

# **RENJA PERUBAHAN 2023**

## **KECAMATAN PURWAKARTA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN PURWAKARTA  
JL. VETERAN NO. 58 PURWAKARTA**





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**KECAMATAN PURWAKARTA**

Jln. Veteran No.58 Purwakarta 41115

**KEPUTUSAN CAMAT PURWAKARTA**

Nomor : PR. 04 / 166 / Kep. PKP / 2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( P- RENJA )**  
**KECAMATAN PURWAKARTA TAHUN 2023**

**CAMAT PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD, maka Renja Kecamatan Darangdan Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sesuai huruf a dan b untuk tertib administrasi perlu dibentuk tim penyusun perubahan renja dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan merubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (LNRI tahun 2003 nomor 47, TLNRI 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara (LNRI tahun 2004 nomor 104, TLNRI nomor 4421);
4. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerinta Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwakarta dan Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas untuk mengupayakan agar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwakarta dan tersusun sesuai dengan Perubahan RKPD Kab. Purwakarta, Antara lain :

1. Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwakarta;
2. Melakukan evaluasi program dan kegiatan pada rencana kerja yang dilaksanakan pada triwulan II;
3. Menetapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 08 Agustus 2023

**CAMAT PURWAKARTA**



**AAN S.Pdi, KP, M.Si**

NIP. 197502152000121001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Purwakarta tahun 2023 telah selesai disusun , Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwakarta tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Perubahan Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perubahan Kecamatan Purwakarta dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, program program dan kegiatan indikatif Kecamatan Purwakarta selama sisa tahun berjalan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.

Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Kecamatan Purwakarta, besar harapan kami agar Renja Perubahan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Kantor Kecamatan Purwakarta dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Allah SWT,Aamiin.

Purwakarta, 14 Agustus 2023

CAMAT PURWAKARTA



AAN S.Pdi, KP, M. Si  
NIP.19751215 200012 1 001

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** .....

**DAFTAR ISI** .....

**BAB I PENDAHULUAN** .....

1.1. Latar Belakang .....

1.2. Landasan Hukum .....

1.3. Maksud dan Tujuan .....

1.4. Sistematika Penulisan .....

**BAB II EVALUASI RENJA TAHUN BERKENAAN S/D TRIWULAN II**

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH** .....

**BAB IV PENUTUP** .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan ( RENJAP) Tahun 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Purwakarta yang telah berjalan, untuk mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan PD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja perubahan PD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja perubahan PD berperan penting dalam setiap kinerja suatu PD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Purwakarta merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan.

Rencana Kerja Perubahan merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan ,sub kegiatan pagu anggaran kedalam aplikasi SIPD perubahan dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan 2023.

Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2023 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Penyusunan RENJA Perubahan berpedoman pada Renstra Perubahan Kecamatan Purwakarta dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang stimultan dengan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan Kecamatan.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Dasar Hukum yang melatar belakangi penyusunan RENJA PERUBAHAN (RENJA) Kecamatan Purwakarta Tahun 2023 Kecamatan Purwakarta adalah :

1. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;



7. Undang - Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
8. Undang - Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 - 2019 ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018, tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 101 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Purwakarta tahun 2023, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan tahun 2023.
3. Sebagai dasar tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan yang dicapai.
4. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis sekaligus pedoman dalam

menyusun Renja Perubahan Pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan Pemerintah dan Masyarakat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan**

##### **Purwakarta .**

- **Bab. I Pendahuluan**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

- **Bab. II Evaluasi RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan. (Tabel Evaluasi Triwulan II)

- **Bab. III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel matrik

##### **Bab. IV Penutup.**

## BAB. II

### EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN PURWAKARTA TAHUN 2023

#### 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

PD Kecamatan Purwakarta telah mengevaluasi Kinerja tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan dan sub kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan dan sub kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu sub kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan dan sub kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan fungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan

pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2023 Renja Perubahan Kecamatan Purwakarta adalah sebagai berikut:

Dari pagu anggaran murni Kecamatan Purwakarta tahun 2023 sebesar Rp. 24.925.780.619, dan mengalami perubahan parsial 1 dengan pagu anggaran murni Rp. 24.679.907.959, realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sudah sebesar Rp. 9.734.195.688 atau capaian realisasi sebesar 39% dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan .

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PURWAKARTA**

Kecamatan Purwakarta dalam membuat kebijakan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perubahan 2018-2023 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Purwakarta sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA PERUBAHAN yang mengacu kepada perubahan RPJMD 2018-2023.



Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran yaitu :

- Faktor Pendorong :
  - Mekanisme kerja Kecamatan Purwakarta yang berorientasi kepada pencapaian kinerja
  - Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Kecamatan Purwakarta dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi
  - Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan
  - Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- Faktor Penghambat :
  - Faktor faktor kegiatan dan program masih ditemukan kendala salah satunya kurang memadainya sarana prasarana kerja Kecamatan Purwakarta sebagai sarana pendukung pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
  - Target dan realisasi tidak akan sama dengan target yang telah direncanakan
  - Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya

sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur, guna mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalani kerjasama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf.

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI KECAMATAN**

### **PURWAKARTA**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Purwakarta tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain:

- Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Purwakarta secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kecamatan Purwakarta masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan nilai tersebut atau meningkatkannya
- Sistem Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Purwakarta masih perlu di perbaiki dan belum sepenuhnya optimal dalam struktur dan penataan sistem pelayanan.



## **2.4 SOLUSI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN**

### **HASIL RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PURWAKARTA TAHUN 2023**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Purwakarta adalah :

- Kurangnya koordinasi Kompetensi Personal Pegawai dan tidak linear dalam tufoksinya, solusi yang dilakukan dengan cara mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi
- Kegiatan dan Sub Kegiatan banyak yang belum dilaksanakan dikarenakan , solusi yang dilaksanakan yaitu memprioritaskan sub kegiatan yang bersifat rutin dan menggeser anggaran sub kegiatan yang sekiranya tidak terlalu prioritas.

EVALUASI KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PER TRIMULAN TAHUN 2023  
KECAMATAN PURWAKARTA

1	2	3	4	Target Capaian Kinerja RKPd Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2023 (TRIMULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2023 (TRIMULAN II)	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				24.925.780,619		3.267.291.801		9.687.950.888
7	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.184.939,575	13%	2.679.947.101	39%	7.089.950.988
7	01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	9 Dokumen	0%	-	0%	-
7	01 01	2 01	29.187,800						
7	01 01	2 01 01	21.051.800						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	1 Dokumen	-		-	-
7	01 01	2 01 06	8.136,000						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	85 orang/bulan	21%	2.407.777.728	52%	5.968.446.733
7	01 01	2 02	11.426.469,035						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1 laporan	-	-	-	-
7	01 01	2 02 05	36.124,300						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Peralatan sarana dan prasarana disiplin pegawai						
7	01 01	2 06	855.649,872				36.685,800	18%	154.665,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga						
7	01 01	2 06 01	114.998,700						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1 paket	-	-	1 paket	24.055,200
7	01 01	2 06 03	159.999,900						
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
7	01 01	2 06 04	325.683,272				32.575,800	1 paket	71.257,800
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga yang disediakan/ jumlah pemenuhan BMD yang disediakan	Paket	1 paket	100,000,000	-	1,980,000	1 paket	1,980,000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor/ jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	Laporan	241 laporan	129,968,000	-	2,130,000	-	3,890,000
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggantian	Dokumen	1 dokumen	25,000,000	-	-	-	-
7	01	01	2	07	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman rapat			367,236,900	0%	-	75%	275,640,000
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Unit	66 unit	100,159,300	-	-	66 unit	100,156,000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	Unit	36 unit	267,077,600	-	-	20 unit	175,484,000
7	01	01	2	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor			1,860,601,668	13%	235,483,573	36%	676,697,165
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1 laporan	8,750,000	-	2,050,000	1 laporan	3,480,000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3 laporan	259,799,500	-	16,424,759	3 laporan	33,031,327
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat	Laporan	1 laporan	40,330,000	-	-	-	-
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12 laporan	1,551,722,168	-	217,008,814	2 laporan	640,215,828
7	01	01	2	09	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			609,670,000	0%	-	3%	16,400,000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemenuhan jasa Tenaga Administrasi Non PNS/ jumlah pemenuhan Premi BPJS bagi Pegawai Non ASN	unit	46 unit	139,000,000	-	-	9 unit	16,400,000

7	01	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	10 unit	302,745,000	-	-	-	
7	01	01	2	09	10		Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	unit	1 unit	167,925,000	-	-	0	
7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas			99,999,600	0%	-	20%	19,500,000
7	01	02					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					99,999,600	0%	-	20%	19,500,000
	01	02	2	01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Dokumen	5 dokumen	99,999,600	0%	-	64 kegiatan	19,500,000
7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase penyampaian kegiatan di tingkat Kecamatan			8,608,261,800	7%	562,444,800	30%	2,548,700,000
7	01	03	2	05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					83,127,000	0%	-	0%	-
7	01	03	2	05	03		Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah kegiatan penanganan Covid-19 tingkat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	1 kegiatan	83,127,000	-	-	-	-
7	01	03	2	01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Rencana Pembangunan di wilayah Kecamatan			101,294,800	40%	40,244,800	0%	-
7	01	03	2	01	02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan		Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Dokumen	1 dokumen	51,294,800	1 dokumen	40,244,800	1 dokumen	-
7	01	03	2	01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	12 laporan	50,000,000	-	-	-	-
7	01	03	2	02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					8,423,840,000	6%	522,200,000	30%	2,548,700,000
7	01	03	2	02	02		Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	2 unit	1,800,000,000	-	-	-	-



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PURWAKARTA**

#### **3.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023**

Penyusunan RENJA Perubahan berpedoman pada Renstra Perubahan Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2023. Penyusunan RENJA Perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang stimulan dengan penyusunan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) perubahan RENSTRA.

#### **3.2.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan yang direncanakan untuk periode tahun 2018-2023 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan yang mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksible terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja

program/kegiatan Kecamatan Purwakarta berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran .Untuk besaran anggaran pada program ,kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Purwakarta mengalami penurunan . Perubahan terjadi akibat adanya efisiensi anggaran dan pergeseran nominal anggaran di masa pandemi, sehingga perlu untuk pergeseran anggaran.

### **3.3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA PERUBAHAN berpedoman pada Renstra Perubahan Kecamatan Purwakarta dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) perubahan. Penyusunan RENJA PERUBAHAN bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan.

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel matriks perubahan berikut ini :

**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok dan Sasaran	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
			Semula	Menjadi	Renja 2023	APBD 2023	Renja 2023 Perubahan							
	UNSUR KEMILAYAHAN													
	KECAMATAN				23.100.780.619		24.925.786.619		34.679.907.939		Kecamatan Purwakarta			32.227.408.105
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SKIP Perangkat Daerah	CC Opini		15.380.116.728		15.164.939.573		15.022.199.925				CC Opini	19.111.779.699
		Perencana Pemerintahan Perundang Perundangan	80%				80%						80%	
7 01 01 2 01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perundangan dan evaluasi kinerja yang disusun	9 dokumen		29.382.791		29.487.800		29.487.800				9 dokumen	47.210.582
7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		21.190.600		21.051.800		21.051.800		Kecamatan Purwakarta		6 dokumen	22.104.390
7 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	1 dokumen		8.192.191		8.136.000		8.136.000		Kecamatan Purwakarta		1 dokumen	9.011.410
7 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan ASN	14 bulan/dokumen		11.468.921.093		11.462.599.335		11.462.599.335		Kecamatan Purwakarta		14 bulan/dokumen	14.990.821.993
7 01 01 2 02 01	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	85 orang/bulan		11.426.469.035		11.426.469.035		11.426.469.035		Kecamatan Purwakarta		85 orang/bulan	14.966.234.763



7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	22.352,028	36.124,300	36.124,300	Kecamatan Purwokarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkram dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang maju dan modern	Kecamatan Purwokarta	1 laporan	24.580,230	
7	01	01	2	06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan; Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan; Jumlah kebutuhan barang kantor yang disediakan; Jumlah cetak dan pengandaan; Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan; Jumlah pemenuhan komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 legiitan	6 legiitan	864.393,110	855.643,872	875.649,872	Kecamatan Purwokarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkram dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang maju dan modern	Kecamatan Purwokarta	1 paket	131.447,745	
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Perangkat Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	200.000,000	159.999,900	159.999,900	Kecamatan Purwokarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkram dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang maju dan modern	Kecamatan Purwokarta	1 paket	134.631,650	
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	246.247,867	325.683,272	345.683,272	Kecamatan Purwokarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkram dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang maju dan modern	Kecamatan Purwokarta	518.372,653	518.372,653	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengandaan	1 paket	1 paket	158.930,093	100.000,000	100.000,000	Kecamatan Purwokarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkram dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang maju dan modern	Kecamatan Purwokarta	1 paket	96.134,417	
7	01	01	2	06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	241 laporan	241 laporan	110.717,200	129.968,000	129.968,000	Kecamatan Purwokarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkram dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang maju dan modern	Kecamatan Purwokarta	241 laporan	121.786,920	
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	25.000,000	25.000,000	25.000,000	Kecamatan Purwokarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkram dan transformasi pelayanan publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang maju dan modern	Kecamatan Purwokarta	1 dokumen	26.250,000	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urahan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	96 unit	97 unit	369.291,168	367.236,900	367.236,900							96 unit	351.220,254

7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	66 Unit	66 Unit	169.291.163	100.159.300	100.159.300	Kecamatan Purwakarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkam dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwakarta	66 Unit	125.770.550	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 Unit	36 Unit	200.000.000	267.077.600	267.077.600	Kecamatan Purwakarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkam dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwakarta	35 Unit	225.449.734	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	5.775.000	8.750.000	8.750.000	Kecamatan Purwakarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkam dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwakarta	1 laporan	6.352.500	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	3 laporan	377.454.000	259.799.500	259.799.500	Kecamatan Purwakarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkam dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwakarta	3 laporan	415.199.400	
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	34.023.000	40.330.000	40.330.000	Kecamatan Purwakarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkam dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwakarta	1 laporan	37.425.300	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	1.564.102.883	1.551.722.168	1.368.976.508	Kecamatan Purwakarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkam dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwakarta	12 laporan	1.720.513.171	
7	01	01	2	09		Pembelian Barang Millis Daerah Pemungut Uraian Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pembelian, biaya operasional atau layanan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertanggungjawabannya	77 unit	77 unit	690.673.713	609.670.000	609.670.000						77 unit	539.951.054
7	01	01	2	09	02	Pembelian, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau layanan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau layanan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertanggungjawabannya	46 unit	46 unit	139.205.000	139.000.000	139.000.000	Kecamatan Purwakarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkam dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwakarta	46 unit	153.125.500	
7	01	01	2	09	09	Pembelian/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor dan dipelihara/rehabilitasi	10 unit	10 unit	351.668.713	302.745.000	302.745.000	Kecamatan Purwakarta	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas Polhutuhkam dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwakarta	10 unit	386.635.564	

8	01	01	3	09	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbaharui/direhabilitasi	1 unit	1 unit	200.000.000	167.925.000	167.925.000	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwokerto	1 unit	-
7	01	02				PROGRAM PENYERANGKAIAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik/Kategori	116.140.700	99.999.600	99.999.600	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah		Kecamatan Purwokerto	Baik/Kategori	127.754.825
	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132 kegiatan	132 kegiatan	116.140.700	99.999.600	99.999.600	Kecamatan Purwokerto			Kecamatan Purwokerto	132 kegiatan	127.754.825
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen	116.140.750	99.999.600	99.999.600	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwokerto	5 dokumen	127.754.825
7	01	03				PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAAN	Persentase Pembedayaan Masyarakat Yang dilaksanakan	90%	80%	7.403.800.478	8.608.261.800	8.525.134.800	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah		Kecamatan Purwokerto	80%	12.767.078.732
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa	3 kegiatan	3 kegiatan	65.000.000	101.294.800	101.294.800	Kecamatan Purwokerto			Kecamatan Purwokerto	3 kegiatan	75.500.000
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pembedayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000	51.294.800	51.294.800	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwokerto	1 dokumen	60.500.000
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pembedayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100.000.000	50.000.000	50.000.000	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwokerto	12 laporan	15.000.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Jumlah pemertinan sarana dan prasarana Kelurahan/jumlah pembedayaan masyarakat Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	7.138.800.478	8.138.800.478	8.423.993.000	Kecamatan Purwokerto			Kecamatan Purwokerto	13 laporan	12.481.578.732
7	01	03	2	02	02	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit	2 unit	200.000.000	1.800.000.000	1.429.993.600	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwokerto	2 Unit	3.827.727.150

7	01	03	2	02	3	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas/Ormas	8 pokmas/Ormas	6.938.800,478	6.523.840,000	6.993.846,400	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwokerto	8 pokmas/Ormas	8.653.851,582	
7	1	3	2	05		Koordinator dan Subkoordinator Pembinaan Kegiatan Masyarakat (PKM)	Jumlah kegiatan pembinaan penanggulangan Covid-19	90 kegiatan	90 kegiatan	200.000,000	83.127,000	-					90 kegiatan	210.000,000	
7	1	3	2	05	3	Pembinaan Penanganan Penanganan Covid-19 tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 tingkat Desa dan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	200.000,000	83.127,000	-					1 kegiatan	210.000,000	
7	01	04				PROGRAM KORDINASI KETERTAMAM DAN KETERTIBAN UMUM	Perentase penanganan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	80 Persen	80 Persen	54.172.800	835.773,744	835.773,744	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah			Kecamatan Purwokerto	80 persen	59.590,000
7	01	04	2	01		Koordinator Ujraya Penyelenggaraan Ketertaman dan ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Satgas Desa Berbudaya	12 bulan	13 bulan	54.172,800	835.773,744	835.773,744					12 bulan	59.590,000	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	12 bulan	54.172,800	835.773,744	835.773,744	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kecamatan Purwokerto	12 bulan	59.590,000	
7	01	05				PROGRAM PENYELANGGARAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM	Perentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	80%	80%	146.549.863	196.805.900	196.805.900	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah			Kecamatan Purwokerto	80%	161.200,849
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBI tingkat Kecamatan	2 kegiatan	3 kegiatan	146.549.863	196.805.900	196.805.900					2 kegiatan	161.200,849	

7	01	05	2	01	01	<p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka menempatkan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Jumlah orang yang mengfurt Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka menempatkan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	2 kegiatan	2 kegiatan	146.549.863	156.805.900	196.805.900	Kecamatan Purwokerto	Pendapatan Asli Daerah	Memperkuat stabilitas pemerintahan dan transformasi pelayanan publik		Kecamatan Purwokerto	2 kegiatan	161.204.849
---	----	----	---	----	----	---	--	------------	------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	------------------------	--	--	----------------------	------------	-------------

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwakarta tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dan di pedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

Dalam rangka mencapai target diharapkan mampu untuk diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kecamatan Purwakarta, diikuti dengan upaya upaya pencapaian yang efektif dan efisien .

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil.

Demikian Renja Perubahan Kecamatan Purwakarta tahun 2023 ini dapat di jadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Camat Purwakarta



AAN S.Pdi.KP.M.Si

NIP. 19750215 200012 1 001